

PEMBERDAYAAN DAN AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN: SEBUAH REFLEKSI SOSIOLOGIS

WOMEN COLLECTIVE ACTION AND EMPOWERMENT: A SOCIOLOGICAL REFLECTION

Ida Ruwaida

Departemen Sosiologi, FISIP UI

Idar.noor@gmail.com

Abstract

This paper focuses on the women's collective action related to the economic empowerment through poverty reduction programs. Empirically, policies and programs of poverty reduction, do not able to stimulate women's capacities and awareness, both individually and collectively. The roles of women is more instrumental than substantive. Moreover, those programs have failed to empower women for organizing themselves to articulate their interests collectively. Some cases reflects that the women's association rely on their leader. It means the performance of association and also the economic matters still depended on the capacity of the leader. The women leaders are able to develop institutional transformation even they face structural and cultural obstacles. Sociologically, it is interesting to reveal the strategies of women agencies in dealing with those obstacles.

Keywords: *Women's collective actions, women agency, economic empowerment, instrumental roles, transformative roles, institutional transformation.*

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan perhatian pada aksi kolektif perempuan dalam upaya pemberdayaan ekonominya melalui program penanggulangan kemiskinan. Berdasar kajian terefleksi bahwa kebijakan maupun program penanggulangan kemiskinan masih belum menstimuli kapasitas dan kesadaran kritis perempuan baik secara individual maupun kolektif. Artinya, perempuan masih diposisikan dengan peran instrumentalnya, bukan peran substantif/transformatifnya. Menariknya, ada kecenderungan program-program yang ada justru menfragmentasi perempuan. Hal ini dimungkinkan ketika kebutuhan dan kesadaran perempuan untuk mengorganisir diri dan memperjuangkan kepentingan bersama masih lemah. Pada sejumlah kasus, aksi kolektif perempuan sangat diwarnai oleh keberadaan figur yang memiliki kapasitas individual sebagai agen perubahan. Aktor perempuan ini mampu melakukan transformasi institusional, meski berhadapan dengan tantangan struktural dan kultural. Secara sosiologis, menarik mengungkap strategi agensi perempuan dalam menyikapi tantangan-tantangan struktural maupun kultural.

Kata kunci: Aksi kolektif perempuan, agensi perempuan, pemberdayaan ekonomi, peran instrumental, peran substantif/transformatif, transformasi institusional.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia, sejalan dengan tujuan pembangunan milenium (MDGs), yang kini dikembangkan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), menempatkan kemiskinan sebagai salah satu masalah utama yang harus ditanggulangi. Data BPS, per September 2015, menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 28,51 juta jiwa (11,13%). Persentase penduduk miskin di desa jauh lebih besar (14,09%) dibandingkan kota (8,2%). Adapun gini ratio mencapai 0,41, nilai di daerah kota lebih besar (0,43) dibanding desa (0,33) (www.bps.go.id). Jika dilihat berbasis gender, data menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan secara ekonomi,

lebih miskin. Berbagai faktor yang melatarinya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang diberlakukan di masyarakat pada perempuan, yang kemudian mengkondisikan kelompok perempuan berpendidikan lebih rendah, menikah pada usia lebih muda, bergantung secara ekonomi pada laki-laki/keluarga, dan lainnya. (www.genderindex.org).

Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan oleh pemerintah, yang pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan (antara 9% hingga 10%) dan juga menurunkan angka gini ratio atau ketimpangan pendapatan (target 0,39). Berkenaan dengan upaya nyata menanggulangi kemiskinan—yang menurut UNDP

lebih berwajah perempuan (www. undp.org), maka strategi yang dikembangkan perlu bersifat terpadu baik menasar pada rumah tangga maupun komunitas, bahkan pada perempuannya sendiri.¹ Salah satu program terkini yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia, yang bersifat terpadu dan terintegrasi, adalah “MAMPU” (maju perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan). Program ini melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan, khususnya organisasi penggiat perempuan/gender di berbagai wilayah.

Pada dasarnya sebagian besar program pemberdayaan ekonomi, termasuk MAMPU (2012-2020), berpijak dari asumsi dasar bahwa memperluas akses peluang pekerjaan bagi perempuan dapat meningkatkan pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Hasil kajian *International Poverty Centre* memang menunjukkan bahwa apabila perempuan tidak mengalami hambatan apapun dalam memasuki pasar tenaga kerja, angka kemiskinan akan berkurang setidaknya 25% di Argentina dan Brazil serta mencapai 40% di Chili. Sementara itu, studi lain menegaskan bahwa memperluas akses peluang pekerjaan bagi perempuan dapat meningkatkan pemberdayaan SDM bagi anak perempuan, serta ditundanya usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan (www.mampu.co.id). Untuk konteks Indonesia, apakah asumsi memberdayakan ekonomi perempuan juga akan memampukan kapasitasnya? Dengan kata lain, apakah program-program penanggulangan kemiskinan yang menasar pada perempuan secara langsung maupun tidak langsung (misalnya kelompok usaha bersama/ KUBE, Simpan Pinjam Perempuan/SPP-PNPM, juga yang terkini MAMPU, serta program lainnya baik di level lokal/nasional/regional) akan memampukan atau memberdayakan perempuan baik secara ekonomi, sosial, bahkan politik?

Menurut Linda Mayoux dan Maria Hartl (2009), program pemberdayaan ekonomi

¹Setidaknya terdapat 3 program penanggulan kemiskinan, yakni: program bantuan khusus pada rumah tangga sangat miskin (RTSM) maupun miskin (RTM); pemberdayaan komunitas (PNPM, SPP, dll); dan penguatan ekonomi (KUBE, dll). Pada level rumah tangga, sejumlah program bantuan khusus antara lain: Bantuan Langsung Tunai (BLT atau BLSM); Kartu Keluarga Sejahtera (KKS/KPS sebagai syarat mendapat BLSM, PKH, dll); Kartu Indonesia Pintar (pemberian beasiswa semacam BSM, Bidik Misi, dll), Kartu Indonesia Sehat (sebelumnya Jamkesmas), dan berbagai program sektoral.

selayaknya memberi benefit pada perempuan, bukan saja partisipasi ekonominya meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraannya meningkat, serta menguatnya kedudukan dan perannya di keluarga juga di masyarakat. Lebih dari itu, Kabeer (2005) menegaskan bahwa hakikat pemberdayaan adalah membangun proses ‘politik’ melalui gerakan atau perjuangan di berbagai arena ‘kekuasaan’ dalam upaya transformasi institusional. Hal itu berarti pemberdayaan bukan hanya memampukan kapasitas individual, tetapi juga organisasional atau institusional. Oleh karena itu, pertanyaan kunci yang muncul adalah “apakah upaya pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan kapasitas perempuan baik di level individual maupun juga kolektif (organisasional)?”. Hal ini mengingat tantangan yang dihadapi perempuan bukan hanya pada aspek kultural, tetapi juga struktural; bukan hanya pada ranah komunitas/masyarakat, tetapi bahkan pada level rumah tangga juga.

Pemberdayaan, Transformasi, dan Agensi Perempuan

Upaya mengatasi kemiskinan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender perlu diarahkan pada akar persoalannya yakni struktur, kondisi sosial, dan kultur masyarakat. Oleh karena itu, menurut Chafetz (1988), perlu dilakukan penghapusan sistem normatif dan ideologis yang mendasari stratifikasi gender (jenis kelamin). Untuk itu perempuan selayaknya tidak berjarak dengan isu-isu kekuasaan dan politik sebagai arena strategis yang bertujuan melakukan transformasi struktural penguasaan sumber daya dari struktur ber-keadilan ke struktur berkeadilan (Chafetz, 1988: 70-72; Lengermann & Niebrugge, 2009: 410-411). Transformasi struktural, pada dasarnya, hanya dimungkinkan jika ada keberpihakan dan komitmen atas realitas yang dianggap tidak adil pada perempuan. Keberpihakan dan komitmen ini, menurut Seidman (1998: 62), memungkinkan para penggiat perempuan melakukan aksi politik karena dilandasi pemahaman dan kesadaran bahwa perempuan mengalami ketimpangan karena adanya blok secara ideologis maupun sosial. Strategi pembebasan dari ketimpangan kekuasaan inilah yang kemudian dikenal sebagai pendekatan pemberdayaan.

Dalam konsepsi Cousins dan Whitmore (1998), pemberdayaan merupakan proses melalui mana kelompok yang diberdayakan mampu

berefleksi demi menentukan nasib/kondisinya sendiri (*self determination*). Melalui pemberdayaan, kelompok sasaran atau dampingan dikondisikan mampu atau memiliki kekuatan dalam menentukan tindakan dan mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupan mereka. Pemberdayaan tersebut memiliki 3 (tiga) kondisi prasyarat, yakni: (1) mengurangi dampak dari hambatan sosial atau pribadi dalam menerapkan kekuasaan, (2) meningkatkan kapasitas dan percaya diri untuk menggunakan kekuatan, dan (3) memindahkan kekuatan dari lingkungan kepada kelompok itu sendiri. Dalam upaya penguatan posisi tawar ini, Kabeer (2005) juga menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan arena 'kekuasaan', yang membutuhkan kemampuan (*the power within*) dalam melakukan aksi nyata (*power struggle*) untuk mengakses, memanfaatkan, mengontrol, dan bertanggung jawab atas sumber daya demi perubahan yang diharapkan. Oleh karena itu, melakukan upaya pemberdayaan tidaklah mudah karena berpijak pada pola relasi yang setara. Kesetaraan relasi ini menurut Cohran dan Henderson (dalam Warren, 1997) mengedepankan rasa saling menghargai di antara berbagai pihak dan mereka senantiasa melakukan refleksi kritis atas proses dan relasi yang terjalin selama proses pemberdayaan.

Penguatan kapasitas individual sekaligus kolektif melalui pemberdayaan juga ditegaskan oleh Young (1993: 158). Menurutnya, perempuan perlu melakukan proses refleksi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Kondisi keberdayaan tersebut teridentifikasi dari sejumlah parameter, yakni: citra diri dan percaya diri yang positif, kemampuan berpikir kritis, kohesivitas kelompok, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan melakukan aksi nyata. Secara konseptual, jika pada bagian sebelumnya Chafetz (1988) mengemukakan pemberdayaan merupakan transformasi struktural, Kabeer (2005) menawarkan transformasi institusional, yakni proses transformasi yang mensyaratkan adanya gerakan atau perjuangan di berbagai arena 'kekuasaan', yakni: dari individu ke kolektif, dari negosiasi privat ke aksi publik, dari ranah informal ke ranah formal. Gagasan Kabeer bagi sebagian kalangan dianggap sebagai alternatif jawaban, dengan memperhatikan tiga aspek/ dimensi yang saling terkait, yakni: *agency*, *resources*, dan *achievement*.

Merujuk pada gagasan Kabeer (2005) tentang transformasi institusional, maka persoalan pertama dan utama yang dihadapi adalah menyangkut agensi. Pada dasarnya agensi

merupakan konsep sentral pemberdayaan, yang merepresentasikan *power* atau kemampuan melakukan pilihan dan mempertimbangkan konsekuensinya. Sementara itu, sumber daya adalah medium melalui mana agensi bekerja. Capaian adalah keluaran agensi. Konteks pemberdayaan sangat terkait dengan kerja agensi dalam kaitannya dengan struktur dan relasi kekuasaan. Ada dua alternatif yang dimungkinkan bagi agensi yakni '*power to*' (bermakna positif, memilih berbeda) atau '*power over*' (bermakna negatif, menguasai/cenderung koersif). Diakui Kabeer bahwa agensi berhadapan dengan norma ideologis dan kultural yang memungkinkan adanya bias. Implikasinya, pilihan tindakan agensi bisa dalam bentuk: (1) agensi yang pasif (aksi dengan pilihan terbatas); (2) agensi yang aktif (bertujuan jelas); (3) agensi efektif (bertindak merujuk pada peran dan tanggungjawabnya); dan (4) agensi transformatif (mampu menantang batasan peran dan tanggung jawab).

Pemberdayaan dan Aksi Kolektif Perempuan

Aksi kolektif merupakan bagian yang melekat dalam proses pemberdayaan. Secara konkret, aksi kolektif perlu melalui tahapan: (1) membangun rasa ingin tahu/ketanggapan, (2) melakukan identifikasi atas berbagai kondisi perempuan, (3) berkembangnya kesadaran, bahkan rasa "marah" pada situasi dan kondisi yang dialami perempuan, (4) melakukan konsolidasi internal maupun ke pihak-pihak lain, (5) terbangun identitas kolektif, yang sekaligus mencerminkan kekuatan atau keberdayaan perempuan, baik sebagai individu maupun kelompok kepentingan. Tahapan ini setidaknya merefleksikan bahwa kesadaran kolektif tidak bisa dipisahkan dari berkembangnya kesadaran personal.

Pada dasarnya, peran perempuan sebagai agensi tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan politik, termasuk interaksi antaraktor lokal. Untuk itu, Schneider dan Libercier (1995: 12) menekankan pentingnya upaya membangun rasa percaya diri di antara aktor yang memiliki beragam latar belakang melalui dialog dan sikap tanggap, serta membangun kesiapan/kemampuan untuk membagi kekuasaan dan mengkombinasikan sumber daya/potensi lokal dengan prosedur dan sumber daya administratif. Mengingat pemberdayaan merupakan *reflective activity* dari kelompok yang *powerless* sehingga mampu memperjuangkan kepentingannya, maka kelompok/aktor lainnya diharapkan mampu berkolaborasi dalam

menciptakan iklim (*climate*), relasi (*relations*), sumber daya (*resources*), dan prosedur (*procedure*) yang bisa mengkondisikan terbangun rasa percaya diri kelompok yang marginal dan rentan. Lebih dari itu, mereka juga mampu membagi kekuasaannya. Inilah yang oleh Himmelman (1994) disebut sebagai strategi pemberdayaan kolaboratif, yang bisa berbentuk: (1) mengorganisasi masyarakat berdasar tujuan/ kepentingan yang ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan, dan (2) memfasilitasi proses yang ‘menyatukan’ pihak-pihak luar dalam mendukung tujuan masyarakat yang difasilitasi (Sardjono, 2004: 172-173).

Strategi kolaboratif mengantarkan pada pemahaman pentingnya sinergi atau produksi bersama antaraktor dalam melakukan pemberdayaan sebagai upaya transformasi sosial. Sinergi ini—meminjam gagasan pemikiran Durkheim—hanya bisa dilakukan jika ada pembagian kerja yang bukan semata bertumpu pada fungsi ekonomi tetapi juga pada sebuah kekuatan moral. Adanya moral solidaritas ini sekaligus memperkuat asumsi bahwa demokratisasi ekonomi terlekat dengan persoalan keadilan sosial, keadilan gender, bahkan keadilan di antara perempuan sendiri. Oleh karena itu, bagi Durkheim, upaya perubahan atau reformasi bersumber dari kekuatan masyarakat. Menurutnya, hal-hal ideal tidak bisa dibentuk dan ditetapkan lewat legislasi, tetapi harus dimunculkan oleh ‘tubuh’ yang paham, berkomitmen, dan mampu mewujudkan hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, ‘asosiasi perempuan’ menjadi signifikan untuk dipersoalkan, termasuk keterikatan sosial di dalamnya.

Dalam konteks keberdayaan perempuan secara kolektif inilah modal sosial perempuan menjadi elemen penting. Modal sosial yang dimaksudkan Putnam (1993) adalah seperangkat hubungan horisontal antarindividu atau *networks of civic engagement*, yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Jaringan ini terbangun dari interaksi antarperempuan, bahkan antarkelompok perempuan, dan mungkin antarkelompok perempuan dengan kelompok lainnya di komunitas, bahkan dengan kelompok ‘penindas perempuan’, sebagaimana yang distrategikan oleh kelompok Feminis Sosialis. Dalam berelasi dengan ‘kelompok penindas’, Karl Marx masih tetap melihat adanya perbedaan kepentingan mendasar antarkelompok dan sulit dicari titik temunya. Bagi Durkheim, meskipun

ada perbedaan kepentingan, tetapi masih dimungkinkan dipertemukan melalui apa yang disebutnya sebagai ‘*common morality*’. Moralitas ini akan menjadi pendorong perubahan/reformasi sosial (Durkheim, 1938/1977 dalam Ritzer & Goodman, 2004; Ritzer, 1996). Sementara itu, Seidman (1998: 62) juga masih melihat peluang membangun ikatan sosial, bahkan mensyaratkan adanya spesialisasi dan interdependensi peran-peran sosial. Ikatan sosial inilah yang menjadi landasan terbangunnya kerjasama untuk pencapaian tujuan atau kepentingan bersama.

Gagasan Durkheim tentang solidaritas sosial menjadi basis semangat kolektif (*collective conscience*) bahkan berkembangnya ‘*collective representation*’. Representasi kolektif mengkondisikan perempuan dari beragam latar belakang melebur menjadi “kelompok tunggal” (*single group*) (Ritzer, 1996). Representasi kolektif inilah yang menjadi agenda utama feminis. Meski, diakui, feminis gelombang ketiga menyadari adanya perbedaan di kalangan perempuan berdasar etnis, agama, status ekonomi, dan lainnya. Perempuan bukanlah kelompok yang homogen, karenanya membangun kesadaran kolektif, apalagi representasi kolektif bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, menurut Cornwall (2000), pembangunan yang partisipatif selayaknya mempertimbangkan diversitas perempuan dan implikasinya pada partisipasi maupun representasinya. Karenanya, Cornwall menegaskan pentingnya memberikan kerangka kembali kepada pembangunan partisipatif, khususnya terfokus pada dua hal, yakni: kewarganegaraan (*citizenship*) dan hak berpartisipasi. Menurutnya, esensi partisipasi adalah memberikan suara dan pilihan, serta mengembangkan kapasitas manusia berikut organisasi dan manajemennya dalam memecahkan masalah guna memperbaiki kondisi atau situasi secara berkelanjutan. Konsekuensinya, partisipasi tidak dijabarkan berdasarkan pada derajat atau tingkatannya, melainkan pada bentuk/tipe partisipasi: nominal, instrumental, representatif, dan transformatif.

Refleksi Teoritik atas Kondisi Nyata Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Menurut Bambang Ismawan (2000), pada dasarnya, kelangsungan dan kemandirian kelompok swadaya masyarakat (KSM) dapat dibangun melalui lima tahap, yakni: (1) penggalian motivasi dan proses penyadaran, (2) pembentukan organisasi, (3) tahap konsolidasi dan stabilisasi organisasi, (4) pengembangan

usaha produksi dan pemasaran, serta (5) tahap kemandirian. Berkenaan dengan tahapan tersebut, jika merefleksikan pada sejumlah program keuangan mikro (KUBE, PEKKA, SPP-PNPM, dll), tampaknya keterbatasan proses rekrutmen anggota sudah ditemukan sejak tahap ke-1, karena motivasi anggota kelompok hanya pada bantuan modal usaha. Dalam kelompok pun tidak dilakukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab, sekaligus kedisiplinan, serta kemandirian. Konsekuensinya derajat konsolidasi dan stabilisasi organisasi relatif rentan, kecuali ditopang oleh figur yang kuat.

Terkait dengan keberadaan figur kuat, biasanya adalah ketua yang bertindak sebagai aktor yang diharapkan menjadi inisiator sekaligus motor penggerak. Kiprah ketua tidak bisa dilepaskan dengan latar belakang atau karakteristik ketua dan kapabilitasnya. Pertanyaannya, apakah figur ketua merepresentasikan kelompok/asosiasinya? Atau sebaliknya, kelompok/asosiasi direpresentasikan melalui figur ketuanya? Berkenaan dengan hal ini, gagasan Durkheim menjadi bagian signifikan. Apakah semangat kolektif (*collective conscience*) menjadi basis berkembangnya '*collective representation*', yang mengkondisikan perempuan beragam latar belakang melebur menjadi "kelompok tunggal" (*single group*)? (Ritzer, 1996). Pada sejumlah kasus empirik, keberadaan ketua asosiasi/kelompok lebih dianggap sebagai representasi simbolik dan belum merepresentasikan kepentingan anggota (representasi kolektif).

Merujuk Ismawan (2000), lemahnya asosiasi horisontal dan juga representasi kolektifnya ditentukan oleh lemahnya tiga tahapan di awal, yakni: penguatan kapasitas dan kesadaran individual, pengorganisasian (pembentukan organisasi), dan konsolidasi-stabilisasi organisasi. Meskipun pada prinsipnya tahapan yang ada tidak berjalan linear, tetapi satu tahap dengan tahap lainnya merupakan satu kesatuan. Contohnya, pada program SPP (Simpan Pinjam Perempuan)-PNPM, terkesan kelompok tidak diorganisasikan secara kuat dan bahkan pembentukan kelompok lebih diorientasikan pada kemudahan mendapatkan dan memperbesar bantuan modal usaha. Oleh karena itu, ketika logika program dimaknai bahwa besar kredit yang disalurkan merupakan indikator capaian proyek (kinerja pemberdayaan), sementara besaran kucuran kredit dipengaruhi oleh besaran kelompok, maka program lebih difokuskan pada

upaya banyaknya kelompok yang dibentuk. Idealnya, proses awal pembentukan kelompok justru menjadi basis keberhasilan pengorganisasian sosial. Artinya, pengorganisasian sosial melalui kelompok, lebih terfokus dan termotivasi pada aspek ekonomi, khususnya pemberian dan pengembalian kredit. Dalam konteks ini, pemampuan secara sosial kurang terefleksi, padahal pilar pembentukan kelompok merupakan dasar pemberdayaan secara sosial.

Lemahnya pengorganisasian ini berbeda dengan praktik *Grameen Bank*, yang pembentukan kelompoknya dilakukan dengan kriteria ketat, yakni: beranggotakan enam orang yang bukan kerabat dan seluruh anggota aktif dalam kegiatan. Keaktifan ini menjadi dasar penilaian atas kelayakan anggota mendapatkan bantuan. Melalui kelompok terbangun solidaritas dan aksi kolektif, yang juga menjadi prasyarat penerimaan bantuan kredit usaha. Dengan demikian ada aturan normatif yang menjadi acuan tindakan anggota, termasuk relasi antaranggota, dan diberlakukan relatif ketat. Berbeda dengan Indonesia, persyaratan dan mekanisme kurang memberdayakan perempuan sebagai individu maupun bagian dari kolektiva. Di sinilah tanggung jawab sosial sekaligus moral selayaknya ditumbuhkan, meskipun relasi sosial dalam kelompok lebih bersifat fungsional (ekonomi).

Refleksi dari Ikasari (2003: 70) yang melakukan studi pada program PPSW di Jakarta memperlihatkan bahwa dalam kelompok, anggota melakukan pertemuan rutin, saling belajar, bahkan saling mengembangkan solidaritas. Selain itu, anggota dapat melakukan simpan pinjam, pengembangan usaha kelompok, juga memberikan bantuan dan memobilisasi sumber daya seperti dana sehat, beasiswa, *jimpitan*, dan arisan. Dari pengalaman berorganisasi, anggota belajar bekerja sama-sama, menjadi pemimpin, dan mengambil keputusan dalam berbagai kegiatan sosial dan produktif yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Meskipun demikian, pada banyak kasus, pengorganisasian sosial lebih bersifat terbatas dan partisipasi anggotanya masih cenderung nominal. Hal ini terkait dengan lemahnya solidaritas yang terbangun dalam kelompok, bahkan dengan pihak-pihak luar. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan latar historis pembentukan kelompok, termasuk tradisi berkelompok (*sense of organized*).

Jika memaknai pemberdayaan sebagai kinerja (selain proses), studi Setyawati (2005) atas program ekonomi di masyarakat pesisir Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan belum optimalnya capaian tujuan program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan. Ketidakefektifan tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak dirancang secara partisipatif, bahkan sinergis. Hal ini mencerminkan lemahnya modal sosial antarwarga/anggota, khususnya jika menyangkut akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi yang terbatas.

Lemahnya sinergitas ini mencerminkan lemahnya aksi/tindakan kolektif perempuan, yang juga masih bertumpu pada figur penggerak. Bahkan, ada kesan bersifat elitis/eksklusif. Kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya kohesi sosial di antara mereka, apalagi membangun kesadaran kritis untuk memperjuangkan hak ekonomi secara kolektif. Padahal, merujuk Young (1993: 158), perempuan terberdayakan jika mampu berefleksi dan melakukan pengambilan keputusan secara kolektif. Keberdayaan ini diindikasikan melalui terbangunnya citra diri, percaya diri yang positif, mampu berpikir kritis, terbangun kelompok yang kohesif, aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta melakukan aksi nyata.

Dengan bahasa lain, lemahnya aksi kolektif perempuan, juga mencerminkan belum terbangunnya relasi horisontal antarindividu atau jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa di tengah diversitas perempuan, sudah terjadi kontak fisik di antara mereka, bahkan terbangun perhatian dan kesadaran bersama. Namun, ikatan emosional bisa dikatakan masih lemah, khususnya antaranggota kelompok. Hal ini disebabkan bukan semata adanya perbedaan latar belakang, tetapi lebih karena subjektivitas anggota sudah terbatas oleh persoalan ekonomi, sehingga relasi sosial yang terbangun pun lebih bersifat transaksional. Hal inilah yang mendasari tidak terbangunnya representasi kolektif, sebagaimana yang disampaikan oleh Durkheim. Meskipun kelompok bersifat sukarela, tetapi partisipasi perempuan di dalamnya masih cenderung instrumental, bahkan fungsional.

Merujuk konsepsi Putnam (1996), kecenderungan tersebut dimungkinkan karena

belum terjalin interaksi yang menjadi basis terbangunnya asosiasi horisontal (kelompok keanggotaan), sekaligus sumber *trust*. Artinya, belum terbentuk ikatan sosial sekaligus ikatan emosional di antara anggota, apalagi dengan pengurus/pengelola. Asosiasi horisontal akan terbangun melalui pembiasaan para anggota dan pengurus untuk berkegiatan bersama dan saling bekerja sama, sehingga mampu mengembangkan solidaritas dan semangat publik (Robert Putnam, Robert Leonardi, Raffaella Nanetti, 1996: 36). Artinya, upaya pengembangan/pemberdayaan ekonomi perempuan perlu lebih berbasis perspektif komunitarian, yang menfokuskan perhatian pada bentuk organisasi sosial yang potensial bagi perempuan dalam membangun komitmen antarperempuan.

Lebih jauh, Jim Ife dan Frank Tesoriero (2006: 425-429) mengemukakan bahwa hal paling pokok dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal adalah pengembangan 'institusi' ekonomi (alternatif) berbasis masyarakat, misalnya Lembaga Keuangan Mikro/LKM, Koperasi, *Credit Union*, dan lain-lain. Meskipun demikian, pengembangan dan penguatan institusi ekonomi lokal bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengorganisasian sosial di tingkat lokal, termasuk pelembagaannya (institusionalisasinya). Hal ini menarik mengingat sejumlah kasus pengorganisasian sosial yang berhasil cenderung berpilar pada isu yang nyata dan dasar di masyarakat, yakni ekonomi. Artinya, program pemenuhan kebutuhan praktis (ekonomi) kepada masyarakat, termasuk perempuan, lebih mudah dikelola karena menentukan eksistensi dan kelangsungan hidup manusia.

Oleh karena itu, selain isu ekonomi, isu pendidikan dan kesehatan merupakan pintu masuk untuk menumbuhkan kepedulian perempuan dan masyarakat. Kedekatan isu pemberdayaan dengan kebutuhan masyarakat akan menumbuhkan minat dan keinginan individu untuk kemudian berkelompok atas dasar kepentingan yang sama. Meskipun temuan menunjukkan bahwa perempuan lebih memilih 'mengelola usaha sendiri walau dengan modal kecil', tetapi isu ekonomi menjadi daya ikat yang menstimulasi keinginan perempuan untuk bergabung dalam kelompok, dengan harapan mendapat bantuan 'modal usaha'. Menurut Durkheim, perlu ada pembagian kerja yang bukan semata memenuhi fungsi ekonomi tetapi juga sebuah kekuatan moral. Menurutnya, hal-hal ideal tidak bisa dibentuk dan ditetapkan lewat legislasi/aturan,

tetapi harus dimunculkan oleh ‘tubuh’ yang paham, berkomitmen, dan mampu mewujudkan hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, keterikatan sosial diharapkan terbangun melalui ‘asosiasi’ (Ritzer, 1996).

Keterikatan sosial yang terbangun, bagaimanapun, tidak bisa dilepaskan dari karakteristik individu-individu yang ada di dalamnya. Kecenderungannya, pembentukan kelompok lebih berbasis pada kekerabatan dan pertemanan, tanpa melakukan identifikasi yang cukup memadai tentang berbagai situasi dan kondisi yang dialami perempuan. Pada beberapa kasus, pembentukan kelompok berhasil dilalui dengan baik dan sudah berjalan. Konsekuensinya, daya ikat atau keterikatan sosial antaranggota sudah terbangun. Demikian pula aturan main dalam kelompok. Meskipun demikian, perbedaan latar belakang bahkan ‘kelas sosial’ menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok yang telah dibentuk tersebut. Artinya, diversitas sosial pengelola dan penerima program, bahkan kondisi keluarga dan masyarakat, mewarnai dinamika komunitas sekaligus organisasi/asosiasi.

Dalam konteks ini, adanya kontak bersama dan fokus/kepentingan bersama belum cukup menjamin terbangunnya asosiasi horisontal. Perlu ada kesamaan kondisi emosi di antara pihak-pihak yang ada, serta representasi simbolik bersama. Dua hal terakhir tidak mudah diwujudkan dalam komunitas dengan ciri: (1) ada ketimpangan sumber daya di antara pelaku interaksi, (2) densitas sosial relatif tinggi, (3) derajat diversitas sosial cukup tinggi. Dalam upaya mengatasi ini, perlu diadakan kegiatan yang memungkinkan terbangun “*cross-cutting affiliation*”, misalnya kegiatan ‘pengajian rutin’, pemberian bantuan sosial, dll. Keaktifan anggota dan masyarakat dalam berkegiatan menunjukkan semangat kolektif (*collective conscience*), dan sebaliknya semangat kolektif mencerminkan besaran ruang partisipasi masyarakat. Pada tahap ‘pembentukan kelompok’, adanya kegiatan bersama bisa menjadi pondasi dalam membangun asosiasi horisontal (kelompok keanggotaan), yang akan menjadi sumber *trust* dan ikatan sosial (Putnam, Leonardi & Nanetti, 1996: 36).

Penutup

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dan pemberdayaannya di bidang ekonomi, khususnya melalui pengembangan program

usaha mikro dan/bantuan kredit usaha (mikro), sejak tahun ’90-an tampaknya menjadi model yang mengglobal, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan perempuan. Pada konteks Indonesia, upaya pengentasan atau penanggulangan kemiskinan pada dasarnya sudah dilaksanakan selama beberapa dekade melalui program pengembangan usaha dan bantuan usaha/kredit mikro. Namun, realitas empirik di tingkat pemampuan perempuan secara ekonomi masih belum mencerminkan gagasan aksi Beijing yang telah digulirkan hampir 20 tahun lalu.²

Keberdayaan perempuan secara sosial juga masih lemah. Hal ini ditandai dengan bentuk partisipasi perempuan yang masih nominal/instrumental. Peran agensi lebih bersifat aktif, belum transformatif. Artinya, meski memiliki tujuan yang jelas, tetapi mereka belum mampu bekerja secara efektif (Kabeer, 2005). Di sisi lain, negara (pemerintah lokal) masih belum cukup berkomitmen pada pemberdayaan ekonomi perempuan, baik secara substansial, institusional, maupun kultural/normatif. Salah satu indikatornya adalah lemahnya refleksi atas berbagai program pemberdayaan yang sudah/tengah berjalan, sehingga terkesan sekedar melakukan replikasi (reproduksi) kebijakan/program, dengan menempatkan perempuan dan usaha mikro-kecil sebagai komoditas pembangunan. Imbasnya pembelajaran perempuan atas program pemberdayaan masih terbatas. Faktor lain yang membatasi perempuan adalah nilai-nilai gender yang relatif masih diberlakukan dengan ketat. Kondisi inilah yang melatari pilihan perempuan sebagai agensi pasif di sebagian wilayah, meski ada juga yang menempatkan diri sebagai agensi aktif, bahkan efektif, meskipun belum ditemukan agen transformatif.

Kalaupun ada asosiasi perempuan (termasuk di tingkat desa), tampaknya belum

²Gagasan Konferensi Perempuan di Beijing adalah: (1) merumuskan kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, khususnya perempuan, (2) revisi hukum dan kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan meningkatnya akses perempuan atas sumber daya ekonomi, (3) meningkatkan akses perempuan atas perbankan, tabungan/investasi, mekanisme dan kelembagaan kredit, (4) mengembangkan riset dan monitoring atas sebab, dampak dan upaya mengatasi feminisasi kemiskinan (dapat dikaitkan dengan tindak lanjut atas ratifikasi konvensi hak ekonomi, sosial, budaya).

berperan sebagai ‘sekolah pemberdayaan’, karena proses ber‘sekolah’ cenderung berjalan secara alamiah. Fasilitasi program tidak optimal dan tidak diorientasikan pada penguatan kelompok secara sosial, karena hanya menekankan pada dimensi ekonominya, bukan sosial dan politiknya. Terbatas atau miskinnya fasilitasi berimplikasi pada lemahnya kapasitas individual maupun kelompok yang diberdayakan. Sementara di sisi lain, determinasi pada figur penggerak menunjukkan lemahnya kinerja pemberdayaan, karena jejaring yang terbangun pun bertumpu pada figur/tokoh tersebut. Pada konteks fasilitasi inilah organisasi masyarakat sipil maupun organisasi basis selayaknya lebih berperan aktif, dan negara idealnya memfasilitasi dari aspek sumber daya, termasuk kebijakan yang terpadu dan berkesinambungan.

Singkatnya, berbagai program replikatif cenderung tidak diiringi upaya pembelajaran yang reflektif dari program-program sebelumnya. Aksi reflektif merupakan salah satu prinsip pemberdayaan, baik sebagai proses maupun kinerja. Merujuk pada Dunst, dkk., pemberdayaan sebagai kinerja tercermin dari kemampuan mengambil pesan pembelajaran melalui proses reflektif. Sebagai proses, pemberdayaan merefleksikan pengalaman, sejarah, dan dinamika upaya pemampuan kelompok dampingan. Oleh karena itu, pemberdayaan perlu waktu panjang. Lemahnya modal sosial antarperempuan juga menunjukkan keterbatasan pemberdayaan sebagai proses, yakni berupa berbagai aktivitas/kegiatan, antara lain *mentoring*, aksi reflektif, dukungan kolektif, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberhasilan keberadaan program MAMPU di berbagai wilayah dalam memampukan perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik, masih dalam rumusan ‘hipotesis’ saja.

Daftar Pustaka

- Chafetz, Janet Saltzman. (1988). *Feminist sociology: An Overview of Contemporary Theories*. Itasca-Illinois, F.E.Paacock Publishers.Inc.
- (1989). Gender equality: Toward a theory of change. In Ruth Wallace (Ed). *Feminism and Sociological Theory*. (p.135-160). California: SAGE Publications, Inc.
- Cornwall, A. (2000). "Making a Difference? Gender and Prticipatory Development". IDS Discussion Paper, No. 378. November.
- Cousins, J.B. & Whitmore, E. (1988). Framing Participatory Evaluation. *New Directions for Evaluation*, 80, p.5-23.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero. (2006), *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*, (Satatrawan Manulang, Nurul Yakin, & M.Nursyahid, penerjemah. 2008). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ikasari. (2003).” Implikasi Program Pemberdayaan terhadap Otonomi Perempuan: Studi Kasus Program Tingkat Netral di Bina Swadaya dan Tingkat Positif di PPSW”. Tesis. Jakarta: Program Kajian Wanita, Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Ismawan, Bambang. (2000). “Bina Swadaya dan Pengembangan Keuangan Mikro untuk Mengatasi Kemiskinan”. Disampaikan pada Lokakarya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Bogor, 4-5 Juli 2000.
- Kabeer, Naila. (1994). *Reversed realities: gender hierarchies in development thought*. London-New York: Verso.
- Kabeer, Naila. (2005). Gender equality and women’s empowerment: A critical analysis of the third millenium development goals. *Gender and Development* Vol.13. No.3. Maret.
- Lengermann. Patricia Madoo, and Jill Niebrugge. (1996). Contemporary feminist theory. In George Ritzer, *Sociological theory*. (p.436-486). The McGraw-Hill Companies. Inc.
- Lengermann. Patricia Madoo, and Jill Niebrugge-Brantley. (2009). Teori feminis kontemporer. Dalam George Ritzer, *Teori sosiologi*. (hal.487-536). (Nurhadi, Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mayoux, Linda and Maria Hartl, “*Gender and rural microfinance: reaching and empowering women: Guide for practitioners*”, International Fund for Agricultural Development (IFAD), 2009.
- Putnam, R. (1993). Making democracy work: civic tradition in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

- Putnam, Robert, and Robert Leonardi, Raffaella Nanetti. (1996). *"Making democracy work: Tradition in modern Italy"*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Pickering, W.S.F, (1998). Representation as understood by Durkheim: an introductory sketch, in WSF Pickering (ed). *Durkheim and Representations: Routledge Studies in Social and Political Thought*. (p.19-31). London and New York: Routledge.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman (2004). *Classical Sociological Theory*. Ohio: McGraw-Hill.
- Ritzer, George. (1996). *Sociological Theory*. Ohio: McGraw-Hill Companies.
- Sardjono, Mustofa Agung. (2004). *Mosak Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik, dan Kelestarian Sumber Daya*. Yogyakarta: Debut Press.
- Setyawati, Yuningtyas. (2005). "Diversifikasi Bidang Usaha Rumah Tangga Nelayan Pantai Ngrenehan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga". Laporan Penelitian. Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Schneider, H. & M.-H. Libercier. (1995). *Toward a New Partnership*. Dalam H. Schneider. & M.-H. Libercier (eds) *Participatory Development: From Advocacy to Action*. Paris: OECD.
- Seidman, Steven. (1998). *Contested knowledge: social theory in the postmodern era*, 2nd edition, USA: Blackwell Publisher Inc.
- Warren, Chris et all. (1997). *Social action with children and families: A community development approach to child and family welfare*, London: Routledge.
- Young, Kate. (1993). *Planning development with women: Making a world of difference*, London and Basingstoke: The Maxmillan Press Ltd.

Daftar Laman

www.bps.go.id

www.undp.org, "Gender and Poverty Reduction",

www.mampu.co.id

Gender Equality in Indonesia", Social Institution and Gender Index, OECD Development Centre, www.genderindex.org

Alejandro Portes and Patricia Landolt, "The Downside of Social Capital", <http://epn.org/prospect/26/26-cnt2.html>.

Miller C. and Razavi S (1998) *Gender Analysis: Alternative Paradigms*. UNDP Website <http://www.undp.org/gender>

<http://www.worldbank.org/participation/participation.htm>

<http://www.undp.org/gender/docs/mdgs-genderlens.pdf>.

